



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa pegawai negeri sipil yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan pegawai negeri sipil, maka perlu diberikan penghargaan berupa pemberian tambahan penghasilan;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil pada Pemerintah Daerah.

7. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
9. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan struktural maupun Jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
10. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai Jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
12. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.
13. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI, adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas Jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
14. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja.
15. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
16. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

17. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit 1 (satu) hari atau lebih dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian TPP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian TPP.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penetapan besaran TPP;
- b. kriteria pemberian TPP;
- c. penerima TPP;
- d. pemberian dan penghitungan TPP;
- e. tata cara pembayaran; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 4

Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan;
- b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
- c. indeks kemahalan konstruksi; dan
- d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB V
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Kriteria Pemberian TPP

Pasal 5

TPP diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. kelangkaan profesi; dan/atau
- d. pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua

TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 6

Pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari Basic TPP.

Bagian Ketiga
TPP Berdasarkan Prestasi Kerja
Pasal 7

Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari Basic TPP.

Bagian Keempat
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi
Pasal 8

Pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Basic TPP.

Bagian Kelima
TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah diberikan kepada Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak Daerah dan retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila mencapai target kinerja.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, TPP untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

- (5) Dalam hal target kinerja pada tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan TPP yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Dalam hal capaian target kinerja pada triwulan IV tahun berkenaan telah mencapai 100% (seratus persen) maka TPP dapat diberikan untuk triwulan yang sebelumnya belum dibayarkan dan dibayarkan pada tahun berikutnya.
- (7) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi capaian target kinerja kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), TPP diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (8) Penerima dan besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENERIMA TPP
Pasal 10

- (1) Berdasarkan kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penerima TPP dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. kelompok A;
 - b. kelompok B;
 - c. kelompok C;
 - d. kelompok D; dan
 - e. kelompok E;
- (2) Penerima TPP kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (3) Penerima TPP kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Sekretaris Daerah.

- (4) Penerima TPP kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan kondisi kerja.
- (5) Penerima TPP kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah terdiri dari:
- a. kepala Perangkat Daerah;
 - b. asisten Sekretaris Daerah;
 - c. staf ahli Bupati;
 - d. kepala bagian pada sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. inspektur pembantu;
 - f. kepala bidang pada badan;
 - g. sekretaris pada dinas;
 - h. lurah;
 - i. PNS pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - j. PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran;
 - k. PNS pada Kelas Jabatan 8 (delapan) pada dinas, sekretariat Daerah, badan dan inspektorat; dan
 - l. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada sekretariat Daerah, badan dan inspektorat.
- (6) Penerima TPP kelompok C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja.
- (7) Penerima TPP kelompok C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. PNS pada dinas kecuali kepala dinas;
 - b. PNS pada kantor kecuali kepala kantor;
 - c. PNS pada kecamatan kecuali camat;
 - d. sekretaris pada badan dan inspektorat;
 - e. sekretaris pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga;
 - f. PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kecuali kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan

- g. Kelas Jabatan 5 (lima), Kelas Jabatan 6 (enam) dan Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada sekretariat Daerah, badan dan inspektorat.
- (8) Penerima TPP kelompok D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan TPP berdasarkan prestasi kerja dan kelangkaan profesi.
- (9) Penerima TPP kelompok D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Jabatan fungsional.
- (10) Penerima TPP kelompok E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan kelangkaan profesi.
- (11) Penerima TPP kelompok E sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e adalah Kelas Jabatan 1 (satu), Kelas Jabatan 2 (dua) dan Kelas Jabatan 3 (tiga).

BAB VII

PEMBERIAN DAN PENGHITUNGAN TPP

Bagian Kesatu

Pemberian TPP

Pasal 11

- (1) Pemberian TPP didasarkan pada Kelas Jabatan dari masing-masing nama Jabatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Perubahan nama Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena terjadi pemindahan atau sebab lain sesuai peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang antara lain memuat nama Jabatan yang baru.
- (3) Dalam hal setelah ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah Jabatan pada peta Jabatan pada Perangkat Daerah bersangkutan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Kelas

Jabatan yang setara atau dibawah Kelas Jabatan semula.

Pasal 12

Pemberian TPP dikecualikan bagi:

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru, PNS guru dan pengawas sekolah, kepala sekolah;
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PNS pada badan layanan umum Daerah;
- c. PNS pada unit kerja yang sudah menerima jasa pelayanan/remunerasi;
- d. PNS yang diberhentikan sementara dari Jabatan negeri;
- e. PNS yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada badan pertimbangan kepegawaian dan/atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- f. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- g. PNS yang diperbantukan dan bekerja secara penuh di instansi lain;
- h. PNS yang sedang menjalani cuti besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- i. PNS yang melaksanakan tugas sebagai sekretaris desa;
- j. PNS yang melaksanakan tugas sebagai kepala desa;
- k. PNS yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun; dan
- l. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah paling sedikit selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau 5 (lima) hari kerja secara komulatif dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 13

- (1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari Jabatan negeri karena penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan TPP selama masa pemberhentian sementara dari Jabatan negeri.

- (2) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari Jabatan negeri karena penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan surat pengangkatan kembali dalam Jabatan negeri.

Pasal 14

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) Jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) hanya menerima TPP pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.
- (4) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.).

- (5) Pemberian TPP bagi Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 15

- (1) TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- (2) TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dihitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (3) TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Kelas Jabatannya sampai dengan terbitnya Keputusan Bupati tentang pengangkatan dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS.
- (4) TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan sampai dengan terbitnya Keputusan Bupati tentang pengangkatan dalam Jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Penilaian TPP

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.

- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
- penilaian produktivitas kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima; dan
 - penilaian disiplin kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari TPP yang diterima.

- (3) Pembayaran TPP dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP (yang diterimakan)} = \text{TPP} \times (\text{PK} + \text{DK}) \%$$

Keterangan :

TPP	=	Tambahan Penghasilan Pegawai
PK	=	Produktifitas Kerja
DK	=	Disipilin Kerja

Pasal 17

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PK} = \frac{(30 \times \text{Skor Capaian Kinerja})}{100}$$

- (2) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan penilaian Capaian Kinerja bulanan terhadap target kinerja bulanan dari pejabat penilai terhadap pegawai yang dipimpinnya.
- (3) Penilaian Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- uraian tugas Jabatan;
 - IKU;
 - perjanjian kinerja; dan/atau
 - IKI.
- (4) Rangkaian penilaian Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diawali dengan menetapkan sasaran dan target/Indikator Kinerja pada awal tahun paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya dan

menyusun target bulanan sebagai dasar penilaian Capaian Kinerja bulanan.

- (5) Sasaran dan target/Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) divalidasi oleh atasan langsung serta diinput melalui sistem *e-kinerja*.
- (6) Capaian Kinerja bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) divalidasi oleh atasan langsung.
- (7) Target/Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus selaras dengan target/indikator atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *out put/out come*.
- (8) Skor Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan capaian Indikator Kinerja proses dan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. >80 sampai dengan 100 kategori **Baik** dan dihitung 100;
 - b. >60 sampai dengan 80 kategori **Cukup** dan dihitung 80;
 - c. >40 sampai dengan 60 kategori **Sedang** dan dihitung 60;
dan
 - d. >25 sampai dengan 40 kategori **Kurang** dan dihitung 30.
- (9) Ketentuan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) untuk Sekretaris Daerah dan staf ahli Bupati dilakukan oleh Bupati.
- (10) Ketentuan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) untuk kepala Perangkat Daerah dan asisten Sekretaris Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah, sedangkan kepala bagian pada sekretariat Daerah dilakukan oleh asisten Sekretaris Daerah sebagaimana bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan input sistem *e-kinerja* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) diberikan waktu percobaan paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan penilaian produktifitas kerja dilakukan secara manual.

Pasal 19

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan skor kehadiran pegawai.
- (2) Absensi kehadiran setiap PNS dilakukan dengan rekam kehadiran berdasarkan *finger print*.
- (3) Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pada saat masuk kerja sampai dengan pulang kerja.

Pasal 20

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DK} = \frac{(70 \times \text{skor kehadiran})}{100}$$

- (2) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan skor kehadiran pegawai, meliputi:
- keterlambatan masuk kerja;
 - kepulangan mendahului jam kerja;
 - cuti; dan
 - tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- (3) Skor kehadiran setiap bulan dicetak melalui Aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai (ASIK).
- (4) Ketidakhadiran kerja karena dinas luar yang meliputi diklat, perjalanan dinas ke luar daerah, perjalanan dinas ke luar negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.

- (5) Ketidakhadiran kerja karena libur nasional dan cuti bersama yang jatuh pada hari kerja dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (6) Ketidakhadiran kerja tanpa alasan yang sah dihitung sebagai hari tidak hadir masuk kerja.
- (7) Jenis ketidakhadiran meliputi:
 - a. TL (Terlambat);
 - b. PSW (Pulang Sebelum Waktunya);
 - c. cuti; dan
 - d. TM (Tidak Masuk).
- (8) TL (Terlambat) dan PSW (Pulang Sebelum Waktunya) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b dapat diakumulasikan menjadi 1 (satu) apabila dalam 1 (satu) hari PNS melakukan TL (Terlambat) dan PSW (Pulang Sebelum Waktunya).
- (9) Prosentase untuk jenis ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Bagi PNS yang TL (Terlambat)/PSW (Pulang Sebelum Waktunya)/TM (Tidak Masuk) karena melaksanakan tugas diluar unit kerja/Perangkat Daerahnya tidak dikenakan pemotongan dengan dibuktikan surat perintah/disposisi dari atasan.
- (11) Bagi PNS yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan berkenaan sebesar 100% (seratus persen).

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.

- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening lain dalam bank yang sama dengan rekening gaji.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pengajuan SPP-LS TPP untuk penerbitan SPM-LS Tambahan Penghasilan dilengkapi dengan:

- a. keputusan Pengguna Anggaran tentang Penerima TPP;
- b. daftar perhitungan ketidakhadiran;
- c. daftar skor Capaian Kinerja;
- d. daftar perhitungan penerimaan TPP;
- e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
- f. ID Billing PPh Pasal 21.

Pasal 23

- (1) SPM-LS TPP diajukan ke Bendahara Umum Daerah dilampiri dengan:
 - a. keputusan Pengguna Anggaran tentang Penerima TPP;
 - b. daftar perhitungan ketidakhadiran;
 - c. daftar skor Capaian Kinerja;
 - d. daftar perhitungan penerimaan TPP;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 - f. ID Billing PPh Pasal 21.
- (2) Format daftar perhitungan ketidakhadiran, daftar skor Capaian Kinerja dan daftar perhitungan penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Daftar daftar nama Jabatan, Kelas Jabatan dan besaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) TPP dihitung mulai bulan Januari 2020.
- (2) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Maret 2020

**BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 4

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004**

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DAFTAR NAMA JABATAN, KELAS JABATAN DAN BESARAN TPP

NO	OPD	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	15	19,000,000
		ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14	9,643,000
		ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	14	9,643,000
		ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	14	9,643,000
		STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	13	8,655,000
		STAF AHLI BUPATI BIDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	13	8,655,000
		STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	13	8,655,000
		KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	12	6,920,000
		KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12	6,920,000
		KEPALA BAGIAN HUKUM	12	6,920,000
		KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	12	6,920,000

	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	12	6,920,000
	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	12	6,920,000
	KEPALA BAGIAN UMUM	12	6,920,000
	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	12	6,920,000
	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	12	6,920,000
	FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (AHLI-MADYA)	11	4,377,000
	FUNGSIONAL PBJ (AHLI-MADYA)	11	4,377,000
	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA	8	3,254,000
	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9	4,048,000
	KEPALA SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH	8	3,254,000
	KEPALA SUB BAGIAN BINA MENTAL SPIRITUAL	8	3,254,000
	KEPALA SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	8	3,254,000
	KEPALA SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	8	3,254,000
	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	4,048,000
	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM	9	4,048,000
	KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI	8	3,254,000
	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN BUMD DAN BLUD	8	3,254,000

	KEPALA SUB BAGIAN PEREKONOMIAN	8	3,254,000
	KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	8	3,254,000
	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	8	3,254,000
	KEPALA SUB BAGIAN PENGENDALIAN PROGRAM	8	3,254,000
	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	8	3,254,000
	KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	8	3,254,000
	KEPALA SUB BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	8	3,254,000
	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	8	3,254,000
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN DAN KEPEGAWAIAN	8	3,254,000
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	4,048,000
	KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	8	3,254,000
	KEPALA SUB BAGIAN PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	9	4,048,000
	KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	9	4,048,000
	KEPALA SUB BAGIAN TATA LAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK	9	4,048,000
	KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL	8	3,254,000
	KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	8	3,254,000
	KEPALA SUB BAGIAN KOMUNIKASI DAN	8	3,254,000

	DOKUMENTASI PIMPINAN		
	FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (AHLI-MUDA)	9	3,312,000
	FUNGSIONAL PBJ (AHLI-MUDA)	9	3,312,000
	FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (AHLI-PERTAMA)	8	2,662,000
	FUNGSIONAL PBJ (AHLI-PERTAMA)	8	2,662,000
	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	7	2,608,000
	ANALIS PUBLIKASI	7	2,608,000
	ANALIS PERENCANAAN DAN KERJASAMA	7	2,608,000
	ANALIS BATAS WILAYAH	7	2,608,000
	ANALIS PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH	7	2,608,000
	PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN KEAGAMAAN	7	2,608,000
	ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA	7	2,608,000
	ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	7	2,608,000
	ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	2,608,000
	ANALIS HUKUM	7	2,608,000
	ANALIS SISTEM INFORMASI	7	2,608,000
	ANALIS KEUANGAN	7	2,608,000

	PENELAAH PERKEMBANGAN BUMD	7	2,608,000
	PENELAAH DATA SUMBER DAYA ALAM	7	2,608,000
	ANALIS PEMBANGUNAN	7	2,608,000
	ANALIS PERENCANAAN , EVALUASI DAN PELAPORAN	7	2,608,000
	ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	2,608,000
	PERANCANG KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	7	2,608,000
	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	2,608,000
	BENDAHARA	7	2,608,000
	ANALIS KINERJA	7	2,608,000
	ANALIS KELEMBAGAAN	7	2,608,000
	ANALIS JABATAN	7	2,608,000
	ANALIS PELAYANAN PUBLIK	7	2,608,000
	ANALIS PROTOKOL	7	2,608,000
	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARA	7	2,608,000
	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	7	2,608,000
	PENGOLAH DATA	6	2,266,000
	PENGELOLA KEUANGAN	6	2,266,000
	PENGELOLA INFORMASI PRODUK HUKUM	6	2,266,000

	PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN	6	2,266,000
	PRANATA BARANG DAN JASA	6	2,266,000
	PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	6	2,266,000
	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	6	2,266,000
	SEKRETARIS	6	2,266,000
	PRANATA KEARSIPAN	6	2,266,000
	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARA	7	2,608,000
	VERIFIKATOR KEUANGAN	6	2,266,000
	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR	6	2,266,000
	AJUDAN	6	2,266,000
	PRANATA TAMAN	6	2,266,000
	PRANATA JAMUAN	6	2,266,000
	TEKNIK PRODUKSI MULTIMEDIA DAN WEB	5	1,890,000
	PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
	PENGADMINISTRASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	5	1,890,000
	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	1,890,000
	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000

		PETUGAS PROTOKOL	5	1,890,000
		TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	5	1,890,000
		TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	5	1,890,000
		PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	5	1,890,000
		PENGEMUDI	3	1,203,000
		PRAMU BAKTI	1	1,029,000
2	INSPEKTORAT	INSPEKTUR	14	9,643,000
		SEKRETARIS	12	6,291,000
		INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	11	5,350,000
		INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	11	5,350,000
		INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	11	5,350,000
		AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI (MADYA)	11	4,377,000
		AUDITOR AHLI (MADYA)	11	4,377,000
		PENGAWAS PEMERINTAHAN AHLI (MADYA)	11	4,377,000
		AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI (MUDA)	9	3,312,000
		AUDITOR AHLI (MUDA)	9	3,312,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,254,000
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	8	3,254,000

	AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI (PERTAMA)	8	2,662,000
	AUDITOR AHLI (PERTAMA)	8	2,662,000
	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	7	2,608,000
	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	7	2,608,000
	BENDAHARA	7	2,608,000
	AUDITOR TERAMPIL (PELAKSANA LANJUTAN)	7	2,347,000
	PRANATA KEARSIPAN	6	2,266,000
	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
	PENGOLAH DATA	6	2,266,000
	PENGELOLA DATA PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	6	2,266,000
	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	6	2,266,000
	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	2,266,000
	PENGOLAH DATA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA	6	2,266,000
	AUDITOR TERAMPIL (PELAKSANA)	6	2,040,000
	PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	1,890,000
	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	1,890,000

		PENGEMUDI	3	1,203,000
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	14	9,643,000
		SEKRETARIS	12	6,291,000
		KEPALA BIDANG PERENCANAAN FISIK DAN PRASARANA	11	5,350,000
		KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN	11	5,350,000
		KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL, BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	11	5,350,000
		KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN INOVASI DAERAH	11	5,350,000
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	4,048,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	4,048,000
		KEPALA SUB BIDANG PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA AIR	9	4,048,000
		KEPALA SUB BIDANG KECIPTAKARYAAN DAN PERUMAHAN	9	4,048,000
		KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP	9	4,048,000
		KEPALA SUB BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	9	4,048,000

	KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	9	4,048,000
	KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	9	4,048,000
	KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	9	4,048,000
	KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4,048,000
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,254,000
	KEPALA SUB BIDANG PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	8	3,254,000
	KEPALA SUB BIDANG PERINDUSTRIAN, TENAGA KERJA DAN PENANAMAN MODAL	8	3,254,000
	KEPALA SUB BIDANG SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	3,254,000
	KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH	8	3,254,000
	PERENCANA AHLI PERTAMA	8	2,662,000
	BENDAHARA	7	2,608,000
	ANALIS KEUANGAN	7	2,608,000
	ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	2,608,000

		ANALIS PERENCANAAN	7	2,608,000
		ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	2,608,000
		ANALIS SISTEM JARINGAN JALAN JEMBATAN	7	2,608,000
		ANALIS SUMBER DAYA AIR	7	2,608,000
		ANALIS BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	7	2,608,000
		ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN	7	2,608,000
		PENYUSUN RENCANA TATA RUANG	7	2,608,000
		ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH	7	2,608,000
		ANALIS SOSIAL BUDAYA	7	2,608,000
		ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN	7	2,608,000
		ANALIS PARIWISATA	7	2,608,000
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	2,608,000
		ANALIS PEMBANGUNAN	7	2,608,000

		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
		PRANATA KEARSIPAN	6	2,266,000
		PENGOLAH DATA	6	2,266,000
		VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN	6	2,266,000
		PENGELOLA DATA	6	2,266,000
		PENGELOLA TEKNIS SURVEY JARINGAN PRASARANA DAN PELAYANAN	6	2,266,000
		PENGELOLA PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	6	2,266,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	1,890,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,203,000
4	BADAN KEUANGAN DAERAH	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	14	9,643,000
		SEKRETARIS	12	6,291,000

	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	11	5,350,000
	KEPALA BIDANG ASET	11	5,350,000
	KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PELAYANAN PAJAK	11	5,350,000
	KEPALA BIDANG ANGGARAN	11	5,350,000
	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	11	5,350,000
	KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK	11	5,350,000
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	4,048,000
	KEPALA SUB BIDANG PENERIMAAN DAN PEMBUKUAN	9	4,048,000
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	8	3,254,000
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,254,000
	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PENDAPATAN	8	3,254,000
	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BELANJA	8	3,254,000
	KEPALA SUB BIDANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD	8	3,254,000
	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PEMELIHARAAN ASET	8	3,254,000
	KEPALA SUB BIDANG INVENTARISASI DAN AKUISISI ASET	8	3,254,000
	KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENATAUSAHAAN ASET	8	3,254,000
	KEPALA SUB BIDANG PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN	8	3,254,000

	KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN	8	3,254,000
	KEPALA SUB BIDANG ADMINISTRASI EVALUASI ANGGARAN	8	3,254,000
	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN	8	3,254,000
	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN	8	3,254,000
	KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG	8	3,254,000
	KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	8	3,254,000
	KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BELANJA LANGSUNG	8	3,254,000
	KEPALA SUB BIDANG INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI	8	3,254,000
	KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN	8	3,254,000
	KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN	8	3,254,000
	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	2,608,000
	BENDAHARA	7	2,608,000
	PENATA LAPORAN KEUANGAN	7	2,608,000
	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	7	2,608,000
	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	7	2,608,000
	PENYUSUN RENCANA HASIL TELAAHAN USUL PENGHAPUSAN BARANG	7	2,608,000
	PENATA KEUANGAN	7	2,608,000
	ANALIS KEBIJAKAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	7	2,608,000

		PENGOLAH DATA	6	2,266,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
		VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN	6	2,266,000
		PENGOLAH DATA PENGELOLAAN KEUANGAN	6	2,266,000
		PENGOLAH DATA LAPORAN REALISASI ANGGARAN	6	2,266,000
		PENGELOLA DATA BELANJA DAN LAPORAN KEUANGAN	6	2,266,000
		PENGELOLA PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD	6	2,266,000
		PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	6	2,266,000
		PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA	6	2,266,000
		PENGELOLA AKUISISI	6	2,266,000
		PENGELOLA DATA REKONSILIASI	6	2,266,000
		PENGELOLA PENAGIHAN DAN PENGAWASAN	6	2,266,000
		PENGOLAH DATA PENAGIHAN PAJAK	6	2,266,000
		PENGOLAH DATA PEMERIKSAAN PAJAK	6	2,266,000
		PENGELOLA DATA PELAYANAN PERPAJAKAN	6	2,266,000
		PENGELOLA WAJIB PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	6	2,266,000
		PENGELOLA PELAPORAN DATA PENERIMAAN	6	2,266,000
		VERIFIKATOR ANGGARAN	6	2,266,000

		PENGOLAH DATA PENGANGGARAN	6	2,266,000
		PENGOLAH DATA PERENCANAAN PENGANGGARAN	6	2,266,000
		PENGELOLA GAJI	6	2,266,000
		PENGELOLA DATABASE SURAT PERINTAH MEMBAYAR	6	2,266,000
		PENGELOLA DATA KEUANGAN DAERAH	6	2,266,000
		VERIFIKATOR KEUANGAN	6	2,266,000
		PENGELOLA DATA PENCAIRAN DANA	6	2,266,000
		PENGOLAH DATA PENDATAAN, PEMETAAN, DAN PENILAIAN	6	2,266,000
		PENGOLAH DATA PENGUKURAN DAN PEMETAAN	6	2,266,000
		PENGELOLA DATA DAN POTENSI PAJAK	6	2,266,000
		PENGELOLA PBB P2 DAN BPHTB	6	2,266,000
		PENGELOLA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK/ RETRIBUSI	6	2,266,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGEMUDI	3	1,203,000
5	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	14	9,643,000

	ASSESOR SDM APARATUR AHLI (UTAMA)	13	7,081,000
	SEKRETARIS	12	6,291,000
	KEPALA BIDANG FORMASI DAN INFORMASI	11	5,350,000
	KEPALA BIDANG MUTASI	11	5,350,000
	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN	11	5,350,000
	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI (MADYA)	11	4,377,000
	ASSESOR SDM APARATUR AHLI (MADYA)	11	4,377,000
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	4,048,000
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	4,048,000
	KEPALA SUB BIDANG FORMASI DAN PENGADAAN	9	4,048,000
	KEPALA SUB BIDANG INFORMASI DAN DATA	9	4,048,000
	KEPALA SUB BIDANG KINERJA DAN PENGHARGAAN	9	4,048,000
	KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN DAN PEMINDAHAN	9	4,048,000
	KEPALA SUB BIDANG PEMBERHENTIAN DAN PENSUN	9	4,048,000
	KEPALA SUB BIDANG JABATAN	9	4,048,000
	KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9	4,048,000
	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIER	9	4,048,000
	KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN	9	4,048,000

	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI (MUDA)	9	3,312,000
	ASSESOR SDM APARATUR AHLI (MUDA)	9	3,312,000
	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI (PERTAMA)	8	2,662,000
	ASSESOR SDM APARATUR AHLI (PERTAMA)	8	2,662,000
	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	2,608,000
	BENDAHARA	7	2,608,000
	ANALIS SUMBER DAYA APARATUR	7	2,608,000
	ANALIS SISTEM INFORMASI	7	2,608,000
	ANALIS KINERJA	7	2,608,000
	ANALIS JABATAN	7	2,608,000
	ANALIS SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR	7	2,608,000
	ANALIS DIKLAT	7	2,608,000
	ANALIS PENGEMBANGAN KARIR	7	2,608,000
	ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	7	2,608,000
	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
	PENGOLAH DATA	6	2,266,000
	PENGELOLA DATA	6	2,266,000
	PENGELOLA SISTEM INFORMASI	6	2,266,000

		PENGELOLA SITUS/ WEB	6	2,266,000
		PRANATA KEARSIPAN	6	2,266,000
		PRANATA DIKLAT	6	2,266,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PRAMU BAKTI	1	1,029,000
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	KEPALA SATUAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	14	9,643,000
		SEKRETARIS	12	6,920,000
		KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11	5,350,000
		KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBERDAYA APARATUR	11	5,350,000
		KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	11	5,350,000
		KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	11	5,350,000
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	4,048,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,254,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	8	3,254,000
		KEPALA SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8	3,254,000
		KEPALA SEKSI PEMADAM KEBAKARAN	8	3,254,000

	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN MANAJEMEN INFORMASI PUBLIK	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENINDAKAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI KERJASAMA	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	8	3,254,000
	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	2,869,000
	BENDAHARA	7	2,869,000
	PRANATA KEARSIPAN	6	2,493,000
	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,493,000
	PENGELOLA DATA	6	2,493,000
	PENGOLAH DATA	6	2,493,000
	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6	2,493,000
	PRANATA PEMADAM KEBAKARAN	6	2,493,000
	POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA	6	2,040,000
	PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,079,000
	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	2,079,000

		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,079,000
		POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	5	1,701,000
		PENGEMUDI MOBIL PEMADAM KEBAKARAN	3	1,203,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,203,000
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14	9,643,000
		SEKRETARIS	11	5,350,000
		KEPALA BIDANG STANDARISASI PENANAMAN MODAL DAN PTSP	11	5,350,000
		KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL	11	5,350,000
		KEPALA BIDANG PERIZINAN	11	5,350,000
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	4,048,000
		KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DAN PTSP	9	4,048,000
		KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA	9	4,048,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,254,000
		KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN PUBLIKASI PENANAMAN MODAL DAN PTSP	8	3,254,000
		KEPALA SEKSI STANDARISASI PENANAMAN MODAL DAN PTSP	8	3,254,000
		KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL	8	3,254,000

	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PENANAMAN MODAL	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN USAHA	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI VERIFIKASI ADMINISTRASI PERIZINAN	8	3,254,000
	BENDAHARA	7	2,869,000
	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	2,869,000
	PENYUSUN BAHAN PENERAPAN STANDAR WAJIB DAN PENANGANAN PENGADUAN	7	2,869,000
	PENYUSUN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	7	2,869,000
	ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	2,869,000
	ANALIS DOKUMEN PERIZINAN	7	2,869,000
	PENGOLAH DATA	6	2,493,000
	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,493,000
	PRANATA KEARSIPAN	6	2,493,000
	PENGELOLA DATA PENGEMBANGAN INVESTASI	6	2,493,000
	PENGELOLA DATA LAYANAN PUBLIK DAN HUBUNGAN INVESTOR	6	2,493,000
	PENGELOLA DOKUMEN PERIZINAN	6	2,493,000

		PENGADMINISTRASI UMUM	5	2,079,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	2,079,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	2,079,000
		PENGADMINISTRASI AKSES PERMODALAN	5	2,079,000
		PENGADMINISTRASI PERIZINAN	5	2,079,000
		PENGEMUDI	3	1,203,000
8	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	14	9,643,000
		KEPALA BAGIAN UMUM	11	5,350,000
		KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN	11	5,350,000
		KEPALA BAGIAN KEUANGAN	11	5,350,000
		KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGUATAN KAPASITAS	11	5,350,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN PELAPORAN	9	3,680,000
		KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	8	2,958,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA	8	2,958,000
		KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI RAPAT DAN PROTOKOL	8	2,958,000
		KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI FUNGSI PENGAWASAN DAN ANGGARAN	8	2,958,000

	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN	8	2,958,000
	KEPALA SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	8	2,958,000
	KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI PENGUATAN KAPASITAS	8	2,958,000
	KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI, INFORMASI DAN ASPIRASI MASYARAKAT	8	2,958,000
	KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM	8	2,958,000
	ANALIS PRODUK HUKUM	7	2,608,000
	BENDAHARA	7	2,608,000
	ANALIS HUKUM	7	2,608,000
	PENYUSUN BAHAN INFORMASI	7	2,608,000
	PENGELOLA DATA	6	2,266,000
	PRANATA KEARSIPAN	6	2,266,000
	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
	PENGOLAH DATA	6	2,266,000
	VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN	6	2,266,000
	PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
	PENGEMUDI	3	1,203,000
	PRAMU BAKTI	1	1,029,000

9	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	14	9,643,000
		SEKRETARIS	12	6,291,000
		PENILIK AHLI (MADYA)	11	4,377,000
		PAMONG BELAJAR AHLI (MADYA)	11	4,377,000
		KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	11	4,864,000
		PENILIK AHLI (MUDA)	9	3,312,000
		PAMONG BELAJAR AHLI (MUDA)	9	3,312,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM	9	3,680,000
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	3,680,000
		PENILIK AHLI (PERTAMA)	8	2,662,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,254,000
		KEPALA SEKSI TENAGA PENDIDIK	8	3,254,000
		KEPALA SEKSI TENAGA KEPENDIDIKAN	8	3,254,000

	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI MANAJEMEN SEKOLAH DASAR	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DASAR	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI KURIKULUM SEKOLAH DASAR	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI MANAJEMEN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PEMUDA DAN PRAMUKA	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI OLAHRAGA	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KELUARGA	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT, KURSUS DAN KESETARAAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	8	3,254,000
	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	2,608,000
	BENDAHARA	7	2,608,000
	ANALIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	7	2,608,000
	ANALIS PENDIDIKAN	7	2,608,000

	ANALIS TENAGA KEPENDIDIKAN	7	2,608,000
	ANALIS TATA USAHA	7	2,608,000
	ANALIS KEOLAHRAGAAN	7	2,608,000
	ANALIS KELEMBAGAAN KURSUS DAN PELATIHAN	7	2,608,000
	ANALIS KURSUS DAN KESETARAAN	7	2,608,000
	PENGOLAH DATA	6	2,266,000
	VERIFIKATOR KEUANGAN	6	2,266,000
	PENGELOLA GAJI	6	2,266,000
	PENGOLAH DAFTAR GAJI	6	2,266,000
	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
	PRANATA BARANG DAN JASA	6	2,266,000
	PENGELOLA KENDARAAN	6	2,266,000
	PENGELOLA DATA	6	2,266,000
	PENGELOLA PERPUSTAKAAN	6	2,266,000
	PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	6	2,266,000
	PENGELOLA KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	6	2,266,000
	PENGELOLA DATA KELEMBAGAAN KURSUS DAN PELATIHAN	6	2,266,000
	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	1,890,000

		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KESISWAAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	5	1,890,000
		PENGEMUDI	3	1,203,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,203,000
		PRAMU BAKTI	1	1,029,000
10	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14	9,643,000
		SEKRETARIS	11	5,350,000
		KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11	4,864,000

	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN INFORMASI	9	3,680,000
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASET	9	3,680,000
	KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	9	3,680,000
	KEPALA SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	9	3,680,000
	KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAH RAGA	9	3,680,000
	KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI	9	3,680,000
	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	9	3,680,000
	KEPALA SEKSI KEFARMASIAN	9	3,680,000
	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN	9	3,680,000
	KEPALA SEKSI KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	9	3,680,000
	KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	9	3,680,000
	KEPALA UPT INSTALASI FARMASI	9	3,680,000
	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN UMUM	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	8	3,254,000

	KEPALA SEKSI ALAT KESEHATAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA	8	3,254,000
	APOTEKER AHLI (PERTAMA)	8	2,662,000
	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	2,608,000
	BENDAHARA	7	2,608,000
	ANALIS KEUANGAN	7	2,608,000
	ANALIS GIZI	7	2,608,000
	ANALIS KESEHATAN	7	2,608,000
	ANALIS KESEHATAN IBU DAN ANAK	7	2,608,000
	PEMERIKSA SANITASI	7	2,608,000
	ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR	7	2,608,000
	INSPEKTUR SARANA DAN PRASARANA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	7	2,608,000
	ANALIS OBAT DAN MAKANAN	7	2,608,000
	PENGOLAH DATA	6	2,266,000
	PENGELOLA GAJI	6	2,266,000

	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
	VERIFIKATOR KEUANGAN	6	2,266,000
	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	2,266,000
	PENGELOLA PROGRAM GIZI	6	2,266,000
	PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6	2,266,000
	PENGELOLA PENGAMATAN PENYAKIT DAN IMUNISASI	6	2,266,000
	PENGELOLA PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG	6	2,266,000
	PENGELOLA PENYAKIT TIDAK MENULAR	6	2,266,000
	PENGELOLA DATA	6	2,266,000
	PENGELOLA LABORATORIUM	6	2,266,000
	PENGELOLA OBAT DAN ALAT-ALAT KESEHATAN	6	2,266,000
	PENGELOLA KEFARMASIAN	6	2,266,000
	PENGOLAH DATA PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN	6	2,266,000
	PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN	6	2,266,000
	PENGELOLA PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN	6	2,266,000
	PENGELOLA RUJUKAN KESEHATAN	6	2,266,000
	PENGELOLA PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA	6	2,266,000

		PENGELOLA ADVOKASI KONSELING DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	6	2,266,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI PELATIHAN	5	1,890,000
		PENGADMNISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL PELAKSANA (PEMULA)	5	1,701,000
		ASISTEN APOTEKER TERAMPIL PELAKSANA (PEMULA)	5	1,701,000
		PENGEMUDI	3	1,203,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,203,000
		PRAMU LABORATORIUM	1	1,029,000
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14	9,643,000
		SEKRETARIS	11	5,350,000
		KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	11	4,864,000

	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	3,680,000
	KEPALA UPT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN MUNJUNGAN	9	3,680,000
	KEPALA UPT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN PANGGUL	9	3,680,000
	KEPALA UPT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN WATULIMO	9	3,680,000
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,254,000
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI IDENTITAS PENDUDUK	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PERKAWINAN, PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK DAN KEWARGANEGARAAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	8	3,254,000
	BENDAHARA	7	2,608,000
	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	2,608,000

		PENGOLAH DATA	6	2,266,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
		PRANATA KEARSIPAN	6	2,266,000
		PENGELOLA DATABASE	6	2,266,000
		PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	6	2,266,000
		PENGELOLA KEUANGAN	6	2,266,000
		PENGELOLA DATA	6	2,266,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	5	1,890,000
12	DINAS PERIKANAN	KEPALA DINAS PERIKANAN	14	9,643,000
		SEKRETARIS	11	5,350,000
		KEPALA BIDANG PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP	11	4,864,000
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	3,680,000
		KEPALA SEKSI PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN PEMASARAN	9	3,680,000

	KEPALA SEKSI BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	9	3,680,000
	KEPALA SEKSI PERBENIHAN, KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	9	3,680,000
	KEPALA SEKSI EKSPLOITASI DAN TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN	9	3,680,000
	KEPALA UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN	9	3,680,000
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN	8	3,254,000
	BENDAHARA	7	2,608,000
	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	2,608,000
	ANALIS PASAR	7	2,608,000
	ANALIS MUTU HASIL PERIKANAN	7	2,608,000
	PENYUSUN RENCANA BAHAN TEKNIS PRASARANA DAN SARANA BUDIDAYA	7	2,608,000
	ANALIS BUDIDAYA PERIKANAN	7	2,608,000
	ANALIS PERIKANAN BUDIDAYA	7	2,608,000
	ANALIS STANDARDISASI BUDIDAYA	7	2,608,000
	PENYUSUN RENCANA BAHAN TEKNIS KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	7	2,608,000
	ANALIS POTENSI PERBENIHAN	7	2,608,000
	ANALIS KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	7	2,608,000

	ANALIS BENIH	7	2,608,000
	ANALIS PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN	7	2,608,000
	ANALIS KENELAYANAN	7	2,608,000
	ANALIS ALAT PENANGKAP IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN	7	2,608,000
	ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN	7	2,608,000
	PENGAWAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	2,608,000
	PENYUSUN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN JENIS IKAN	7	2,608,000
	ANALIS KONSERVASI DAN REHABILITASI WILAYAH PESISIR	7	2,608,000
	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
	PENGELOLA DATA	6	2,266,000
	PENGELOLA PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN USAHA	6	2,266,000
	PENGOLAH DATA	6	2,266,000
	PENGELOLA TEKNOLOGI PASCAPANEN	6	2,266,000
	PENGELOLA PELAKSANAAN PENGUJIAN MUTU SECARA LABORATORIS TERHADAP PRODUK HASIL PERIKANAN	6	2,266,000
	PENGELOLA PENGAWASAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	6	2,266,000
	PENGELOLA STATISTIK PERIKANAN	6	2,266,000
	PENGELOLA PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN	6	2,266,000
	PENGELOLA JASA PANGKALAN PENDARATAN	6	2,266,000

		IKAN		
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI ANGGARAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	1,890,000
		TEKNISI KONSERVASI	5	1,890,000
		PENGEMUDI	3	1,203,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,203,000
13	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	14	9,643,000
		SEKRETARIS	11	5,350,000
		KEPALA BIDANG DESTINASI PARIWISATA	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG PEMASARAN	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG INDUSTRI PARIWISATA	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN	11	4,864,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	3,680,000
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	3,680,000
		KEPALA UPT DESTINASI WISATA TERPADU	9	3,680,000

	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI DESTINASI WISATA ALAM	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TATA KELOLA DESTINASI	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI DESTINASI WISATA BUDAYA DAN BUATAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI SARANA PROMOSI DAN INFORMASI PARIWISATA	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI USAHA SARANA PARIWISATA	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI USAHA JASA PARIWISATA	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SDM KEPARIWISATAAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PELESTARIAN TRADISI, SEJARAH DAN CAGAR BUDAYA	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN KELEMBAGAAN SENI BUDAYA	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN	8	3,254,000
	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	2,608,000
	BENDAHARA	7	2,608,000
	KOORDINATOR	7	2,608,000
	PENYUSUN PROGRAM PENULISAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA	7	2,608,000

		PENGOLAH DATA	6	2,266,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
		PRANATA KEARSIPAN	6	2,266,000
		PENGELOLA PEMASARAN	6	2,266,000
		PENGELOLA PROMOSI DAN INFORMASI WISATA	6	2,266,000
		PENGOLAH MAKANAN	6	2,266,000
		PRANATA JAMUAN	6	2,266,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KARCIS	5	1,890,000
		PEMANDU WISATA	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KESENIAN DAN BUDAYA DAERAH	5	1,890,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,203,000
		JURU PUNGUT RETRIBUSI	3	1,203,000
		PRAMU BAKTI	1	1,029,000
		PRAMU KEBERSIHAN	1	1,029,000

14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14	9,643,000
		SEKRETARIS	11	5,350,000
		KEPALA BIDANG PERENCANAAN TEKNIS	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG BINA MARGA	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN JASA KONSTRUKSI	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG PERTANAHAN	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG DAN BANGUNAN	11	4,864,000
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, DAN PELAPORAN	9	3,680,000
		KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JEMBATAN	9	3,680,000
		KEPALA SEKSI KONSERVASI SDA DAN PENGEMBANGAN IRIGASI	9	3,680,000
		KEPALA SEKSI PERMASALAHAN PERTANAHAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	9	3,680,000
		KEPALA UPT LABORATORIUM KONSTRUKSI	9	3,680,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,254,000
		KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN	8	3,254,000
		KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS BANGUNAN AIR	8	3,254,000
		KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG	8	3,254,000
		KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN	8	3,254,000

	KEPALA SEKSI PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI BINA MANFAAT DAN JASA KONSTRUKSI	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENATAGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI INVENTARISASI, PENGUASAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN	8	3,254,000
	BENDAHARA	7	2,608,000
	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	2,608,000
	ANALIS PERENCANAAN	7	2,608,000
	ANALIS JALAN JEMBATAN	7	2,608,000
	ANALIS TEKNIK DAN MATERI	7	2,608,000
	PENGAWAS JALAN DAN JEMBATAN	7	2,608,000
	PENGAWAS BANGUNAN DAN GEDUNG	7	2,608,000
	PEMERIKSA JALAN DAN JEMBATAN	7	2,608,000
	PENGAWAS PENGOPERASIAN ALAT BERAT	7	2,608,000

		ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	7	2,608,000
		ANALIS SUMBER DAYA AIR	7	2,608,000
		PENGAMAT OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	7	2,608,000
		ANALIS BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	7	2,608,000
		PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	7	2,608,000
		ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	7	2,608,000
		ANALIS PENGATURAN DAN PENGADAAN TANAH	7	2,608,000
		ANALIS KONFLIK PERTANAHAN	7	2,608,000
		ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN	7	2,608,000
		PENGUJI LABORATORIUM TANAH, ASPAL DAN BETON	7	2,608,000
		ANALIS TATA RUANG	7	2,608,000
		PENYUSUN RENCANA TATA RUANG	7	2,608,000
		PENGUJI BAHAN LABORATORIUM	7	2,608,000
		PENGUJI BAHAN DAN KONTRUKSI	7	2,608,000
		TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	7	2,347,000
		TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	7	2,347,000
		TEKNIK PENGAIRAN AHLI PERTAMA	7	2,347,000
		PENATA RUANG AHLI PERTAMA	7	2,347,000

	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
	PENGOLAH DATA	6	2,266,000
	PENGELOLA DATA	6	2,266,000
	PENGELOLA PERENCANAAN TEKNIS TATA BANGUNAN	6	2,266,000
	PENGOLAH SARANA DAN PRASARANA PENGAIRAN	6	2,266,000
	PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN	6	2,266,000
	PENILIK JALAN	6	2,266,000
	PENGELOLA PEMELIHARAAN JALAN	6	2,266,000
	PENGELOLA PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	6	2,266,000
	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	6	2,266,000
	PENGELOLA TEKNIK KONSTRUKSI BERKELANJUTAN	6	2,266,000
	PENGELOLA DATA FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN	6	2,266,000
	PENGELOLA TATA RUANG	6	2,266,000
	PENGELOLA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	6	2,266,000
	PENGELOLA TATA RUANG DAN TATA GUNA BANGUNAN	6	2,266,000
	PENGELOLA DATA BAHAN DAN KONTROKSI	6	2,266,000
	PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	1,890,000

		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	1,890,000
		OPERATOR ALAT BERAT	5	1,890,000
		PEMELIHARA JALAN	3	1,203,000
		PENJAGA PINTU AIR	2	1,148,000
		PRAMU BAKTI	1	1,029,000
15	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP	14	9,643,000
		SEKRETARIS	11	5,350,000
		KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI PERMUKIMAN	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	11	4,864,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	3,680,000
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	3,680,000
		KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGENDALIAN	9	3,680,000
		KEPALA SEKSI AIR LIMBAH DOMESTIK DAN DRAINASE	9	3,680,000
		KEPALA UPT TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH	9	3,680,000

	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PERMUKIMAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PERUMAHAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN SANITASI PENYEDIAAN AIR MINUM	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGAJIAN LINGKUNGAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	8	3,254,000
	SANITARIAN PERTAMA	8	2,662,000
	ANALIS PERENCANAAN	7	2,608,000
	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	2,608,000
	BENDAHARA	7	2,608,000
	ANALIS PERENCANAAN WILAYAH PERUMAHAN	7	2,608,000

	PENGAWAS FISIK PEMUKIMAN	7	2,608,000
	ANALIS PERUMAHAN	7	2,608,000
	ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	7	2,608,000
	PENELAAH DAMPAK LINGKUNGAN	7	2,608,000
	PENGAWAS KESELATANAN DAN KESEHATAN KERJA DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN	7	2,608,000
	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	7	2,608,000
	ANALIS LINGKUNGAN HIDUP	7	2,608,000
	TEKNIK PENGAIRAN AHLI PERTAMA	7	2,347,000
	PRANATA KEARSIPAN	6	2,266,000
	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
	PENGOLAH DATA	6	2,266,000
	PENGELOLA DATA	6	2,266,000
	PENGOLAH DATA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN	6	2,266,000
	PENGELOLA LINGKUNGAN	6	2,266,000
	PENGELOLA INFORMASI LINGKUNGAN	6	2,266,000
	PENGELOLA KENDARAAN DAN PERJALANAN DINAS	6	2,266,000

	PENGELOLA SARANA PEMBIBITAN DAN PENGHIJAUAN	6	2,266,000
	PRANATA TAMAN	6	2,266,000
	PENGELOLA SAMPAH	6	2,266,000
	PENGELOLA LIMBAH	6	2,266,000
	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	1,890,000
	PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	1,890,000
	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
	JURU SURVEY PERMUKIMAN PERUMAHAN	5	1,890,000
	TEKNISI KECIPTAKARYAAN	5	1,890,000
	TEKNISI AIR	5	1,890,000
	PENGADMINISTRASI PERIZINAN	5	1,890,000
	PETUGAS KEAMANAN	3	1,203,000
	PENGEMUDI	3	1,203,000
	PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	3	1,203,000
	PRAMU BAKTI	1	1,029,000
	PRAMU KEBERSIHAN	1	1,029,000

		PRAMU TAMAN	1	1,029,000
16	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14	9,643,000
		SEKRETARIS	11	5,350,000
		KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL	11	4,864,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	3,680,000
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	3,680,000
		KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	9	3,680,000
		KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	9	3,680,000
		KEPALA SEKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMENUHAN HAK ANAK	9	3,680,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,254,000

	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DISABILITAS	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENGUATAN KELUARGA	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL MASYARAKAT	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN RESTORASI SOSIAL	8	3,254,000
	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	2,608,000
	BENDAHARA	7	2,608,000
	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	7	2,608,000
	ANALIS MASALAH SOSIAL	7	2,608,000
	PENYULUH PENINGKATAN KUALITAS HIDUP	7	2,608,000

		PEREMPUAN DAN ANAK		
		PENGAWAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	7	2,608,000
		ANALIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN	7	2,608,000
		ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	7	2,608,000
		ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL	7	2,608,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
		PRANATA KEARSIPAN	6	2,266,000
		PENGOLAH DATA	6	2,266,000
		PENGELOLA BIMBINGAN DAN KONSELING	6	2,266,000
		PENGELOLA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DAN LANSIA	6	2,266,000
		PENGELOLA REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL	6	2,266,000
		PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	6	2,266,000
		PENGELOLA DATA BANTUAN SOSIAL	6	2,266,000

	PENGELOLA PERLINDUNGAN SOSIAL	6	2,266,000
	PENGELOLA PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	6	2,266,000
	PENGELOLA PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	6	2,266,000
	PENGELOLA BIMBINGAN SOSIAL	6	2,266,000
	PENGELOLA PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL	6	2,266,000
	PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	6	2,266,000
	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	1,890,000
	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
	PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
	PENGADMINISTRASI REHABILITASI MASALAH SOSIAL	5	1,890,000
	PENGADMINISTRASI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG CACAT	5	1,890,000
	PRAMU BAKTI	1	1,029,000

17	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	14	9,643,000
		SEKRETARIS	11	5,350,000
		KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11	4,864,000
		INSTRUKTUR AHLI (MADYA)	11	4,377,000
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	3,680,000
		KEPALA SEKSI STANDARISASI DAN DESAIN PRODUK INDUSTRI	9	3,680,000
		KEPALA SEKSI INDUSTRI AGRO	9	3,680,000
		PENGANTAR KERJA AHLI (MUDA)	9	3,312,000
		INSTRUKTUR AHLI (MUDA)	9	3,312,000
		PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI (MUDA)	9	3,312,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,254,000
		KEPALA SEKSI SYARAT KERJA	8	3,254,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN JAMSOSTEK	8	3,254,000
		KEPALA SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	8	3,254,000
		KEPALA SEKSI INDUSTRI NON AGRO	8	3,254,000

		KEPALA SEKSI PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	8	3,254,000
		KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	8	3,254,000
		KEPALA SEKSI TRANSMIGRASI	8	3,254,000
		MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI (PERTAMA)	8	2,662,000
		PENGANTAR KERJA AHLI (PERTAMA)	8	2,662,000
		INSTRUKTUR AHLI (PERTAMA)	8	2,662,000
		PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI (PERTAMA)	8	2,662,000
		BENDAHARA	7	2,608,000
		ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	2,608,000
		ANALIS TEKNOLOGI INDUSTRI	7	2,608,000
		ANALIS PENGEMBANGAN USAHA AGRO INDUSTRI	7	2,608,000
		PENGOLAH DATA	6	2,266,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
		PENGELOLA BANGUNAN GEDUNG	6	2,266,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	1,890,000
18	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	14	9,643,000

	SEKRETARIS	11	5,350,000
	KEPALA BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET	11	4,864,000
	KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN	11	4,864,000
	KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	11	4,864,000
	KEPALA BIDANG BINA PRODUKSI DAN BINA USAHA PETERNAKAN	11	4,864,000
	KEPALA BIDANG PERKEBUNAN	11	4,864,000
	KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN	11	4,864,000
	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI (MADYA)	11	4,377,000
	PENYULUH PERTANIAN AHLI (MADYA)	11	4,377,000
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	9	3,680,000
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	9	3,680,000
	KEPALA SEKSI KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	9	3,680,000
	KEPALA SEKSI DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	9	3,680,000
	KEPALA SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	9	3,680,000
	KEPALA SEKSI TANAMAN PANGAN	9	3,680,000
	KEPALA SEKSI BINA USAHA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	9	3,680,000
	KEPALA SEKSI PAKAN DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	9	3,680,000
	KEPALA SEKSI TANAMAN SEMUSIM	9	3,680,000

	KEPALA SEKSI TANAMAN TAHUNAN	9	3,680,000
	KEPALA SEKSI BINA USAHA PERKEBUNAN	9	3,680,000
	KEPALA SEKSI PENYULUHAN	9	3,680,000
	KEPALA SEKSI PRASARANA	9	3,680,000
	PENYULUH PERTANIAN AHLI (MUDA)	9	3,312,000
	KEPALA UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN	9	3,680,000
	KEPALA UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN	9	3,680,000
	KEPALA UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN	9	3,680,000
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN DAN PELAYANAN MEDIKVETERINER	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENGAMATAN PENYAKIT HEWAN DAN PENGAWASAN OBAT HEWAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI TANAMAN HORTIKULTURA	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI BINA USAHA PETERNAKAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI SARANA	8	3,254,000
	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI (PERTAMA)	8	2,662,000

	PENYULUH PERTANIAN AHLI (PERTAMA)	8	2,662,000
	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL (PENYELIA)	8	2,662,000
	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	8	3,254,000
	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	2,608,000
	KOORDINATOR KEBUN PERCOBAAN	7	2,608,000
	ANALIS LABORATORIUM TUMBUHAN DAN SARANA	7	2,608,000
	BENDAHARA	7	2,608,000
	PENGAWAS HYGIENE, SANITASI USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	7	2,608,000
	PENGAWAS LALU LINTAS HEWAN DAN WILAYAH KARANTINA HEWAN	7	2,608,000
	PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT HEWAN	7	2,608,000
	PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT IKAN	7	2,608,000
	ANALIS PANGAN	7	2,608,000
	ANALIS POTENSI BUDIDAYA ANEKA KACANG DAN UMBI	7	2,608,000
	ANALIS POTENSI BUDIDAYA SEREALIA	7	2,608,000
	ANALIS PENINGKATAN USAHA PERTANIAN DAN AGROBISNIS	7	2,608,000
	ANALIS PEMBIAYAAN PERTANIAN	7	2,608,000
	ANALIS PENGOLAH HASIL PERTANIAN	7	2,608,000

	PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK	7	2,608,000
	ANALIS PAKAN TERNAK	7	2,608,000
	PENGAWAS MUTU PAKAN DAN PRODUKSI BIBIT TERNAK BESAR	7	2,608,000
	PENYUSUN RENCANA MANAJEMEN MUTU PASCA PANEN	7	2,608,000
	ANALIS PENGELOLA DATA KOMODITAS PERKEBUNAN	7	2,608,000
	PENYUSUN TEKNIS USAHA BUDIDAYA	7	2,608,000
	ANALIS PEMASARAN HASIL PERTANIAN	7	2,608,000
	ANALIS PROGRAM PENYULUHAN	7	2,608,000
	PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA	7	2,608,000
	ANALIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	7	2,608,000
	ANALIS TANAH PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN	7	2,608,000
	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN TERAMPIL (PELAKSANA LANJUTAN)	7	2,347,000
	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL (PELAKSANA LANJUTAN)	7	2,347,000
	ANALIS PEMASARAN DAN KERJASAMA	7	2,608,000
	PENGOLAH DATA	6	2,266,000
	PENGELOLA INSTALASI KEBUN/ LAHAN PRAKTEK DAN SCREEN HOUSE	6	2,266,000
	PENGELOLA KANDANG HEWAN PERCOBAAN	6	2,266,000
	PENGELOLA KEBUTUHAN BIBIT TANAMAN PADI, BUAH-BUAHAN SERTA SAYURAN	6	2,266,000

	PENGELOLA LAHAN PERTANIAN	6	2,266,000
	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN USAHA TANI	6	2,266,000
	PENGELOLA PETERNAKAN	6	2,266,000
	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
	PRANATA KEARSIPAN	6	2,266,000
	PENGELOLA KESEHATAN TERNAK BESAR, KECIL DAN UNGGAS	6	2,266,000
	PENGELOLA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	6	2,266,000
	PENGELOLA LABORATORIUM	6	2,266,000
	PENGELOLA KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	6	2,266,000
	PENGELOLA KETAHANAN PANGAN	6	2,266,000
	PENGELOLA PENGANEKARAGAMAN PANGAN	6	2,266,000
	PENGELOLA POLA PANGAN HARAPAN	6	2,266,000
	PENGELOLA BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN	6	2,266,000
	PENGELOLA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	6	2,266,000
	PENGELOLA DAN KEBUTUHAN BIBIT TANAMAN PADI, BUAH-BUAHAN SERTA SAYURAN	6	2,266,000
	PENGELOLA BUDIDAYA PENGEMBANGAN TERNAK DAN HEWAN LAINNYA	6	2,266,000
	PENGELOLA INSTALASI TERNAK	6	2,266,000

	PENGELOLA DISTRIBUSI TERNAK GADUHAN DAN SEMI GADUHAN	6	2,266,000
	PENGELOLA LALU LINTAS TERNAK/ PENGURUS IZIN BUDI DAYA TERNAK	6	2,266,000
	PENGELOLA USAHA TANI PETERNAKAN DAN KEHEWANAN	6	2,266,000
	PENGELOLA PASCA PANEN	6	2,266,000
	PENGELOLA PEKARYA KEBUN	6	2,266,000
	PENGELOLA PERLINDUNGAN TANAMAN DAN PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	6	2,266,000
	PENGELOLA PERENCANAAN DAN PELAPORAN USAHA TANI	6	2,266,000
	PENGELOLA BAHAN DATABASE KELEMBAGAAN PETANI	6	2,266,000
	PENGELOLA ADMINISTRASI SISTEM INFORMASI PENYULUH PERTANIAN	6	2,266,000
	PENGELOLA ALAT DAN MESIN PERTANIAN	6	2,266,000
	PENGELOLA TATA GUNA LAHAN, AIR, SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	6	2,266,000
	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL (PELAKSANA)	6	2,040,000
	PERAWAT TERNAK	6	2,266,000
	PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN	6	2,266,000
	PENGELOLA USAHA PEMOTONGAN TERNAK/ UNGGAS DAN LALU LINTAS DAGING	6	2,266,000
	PENGELOLA KEBUN KOPI PERKEBUNAN	6	2,266,000

		PENGELOLA TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN	6	2,266,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	1,890,000
		PELATIH / PAWANG HEWAN	5	1,890,000
		PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA PEMULA	5	1,701,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,203,000
		PRAMU BAKTI	1	1,029,000
		PRAMU KEBERSIHAN	1	1,029,000
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14	9,643,000
		SEKRETARIS	11	5,350,000
		KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI PERDESAAN	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN DESA	11	4,864,000
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	3,680,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,254,000
		KEPALA SEKSI LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA	8	3,254,000

	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI DESA	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PERDESAAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI USAHA EKONOMI PERDESAAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT PERDESAAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN PERDESAAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PERDESAAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	8	3,254,000
	BENDAHARA	7	2,608,000
	ANALIS PERENCANAAN PROGRAM	7	2,608,000
	PENYUSUN BAHAN PROSES PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN	7	2,608,000
	PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN PRODUK SKALA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	7	2,608,000
	ANALIS PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN	7	2,608,000
	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
	PRANATA KEARSIPAN	6	2,266,000
	PENGOLAH DATA	6	2,266,000

		PENGELOLA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	6	2,266,000
		PENGELOLA KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA	6	2,266,000
		PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	6	2,266,000
		PRANATA SUMBER DAYA IPTEK	6	2,266,000
		PENGELOLA PEMBINAAN DAN ANALISIS PEMBANGUNAN	6	2,266,000
		PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6	2,266,000
		PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	6	2,266,000
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGEMUDI	3	1,203,000
		PRAMU BAKTI	1	1,029,000
20	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	14	9,643,000
		SEKRETARIS	11	5,350,000
		KEPALA BIDANG LALU LINTAS	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG ANGKUTAN	11	4,864,000

	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASI	11	4,864,000
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	3,680,000
	KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMATIKA LLAJ	9	3,680,000
	KEPALA SEKSI ANGKUTAN BARANG, KHUSUS DAN LAUT	9	3,680,000
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI ANGKUTAN ORANG DAN TERMINAL	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI KETERTIBAN DAN KESELAMATAN JALAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PERPARKIRAN	8	3,254,000
	KEPALA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	8	3,254,000
	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL (PENYELIA)	8	2,662,000
	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	2,608,000
	BENDAHARA	7	2,608,000
	ANALIS TEKNIK SURVEY MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	7	2,608,000
	ANALIS LALU LINTAS	7	2,608,000
	ANALIS ANGKUTAN DARAT	7	2,608,000

	PENGAWAS ANGKUTAN DAN TERMINAL	7	2,608,000
	ANALIS PERIZINAN	7	2,608,000
	ANALIS ANGKUTAN LAUT	7	2,608,000
	PENGAWAS KESELAMATAN DARAT/ JALAN	7	2,608,000
	PENYUSUN PROGRAM KESELAMATAN ANGKUTAN JALAN	7	2,608,000
	PENYUSUN RENCANA PENGUJIAN	7	2,608,000
	PENGAWAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	7	2,608,000
	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR (PELAKSANA LANJUTAN)	7	2,347,000
	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
	PENGELOLA REKAYASA LALU LINTAS	6	2,266,000
	PENGELOLA SISTEM PELAYANAN ANGKUTAN	6	2,266,000
	PENGELOLA PENERANGAN JALAN	6	2,266,000
	PENGELOLA PERIZINAN ANGKUTAN JALAN	6	2,266,000
	PENGELOLA SARANA ANGKUTAN	6	2,266,000
	PENGELOLA USAHA ANGKUTAN	6	2,266,000
	PRANATA TILANG	6	2,266,000
	PENGELOLA PERPARKIRAN	6	2,266,000
	PENGELOLA DATA	6	2,266,000

		PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL (PELAKSANA)	6	2,040,000
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI LLAJ	5	1,890,000
		TEKNISI PERALATAN, LISTRIK DAN ELEKTRONIKA	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KARCIS	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KECELAKAAN LLAJ	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI CONTOH UJI	5	1,890,000
		PEMELIHARA PENERANGAN JALAN	3	1,203,000
		JURU PUNGUT RETRIBUSI	3	1,203,000
21	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14	9,643,000
		SEKRETARIS	11	5,350,000
		KEPALA BIDANG E-GOVERNMENT DAN STATISTIK	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	11	4,864,000

	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	3,680,000
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI DATA DAN STATISTIK	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI LAYANAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN	8	3,254,000
	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	2,608,000
	BENDAHARA	7	2,608,000
	PERANCANG GRAFIS	7	2,608,000
	ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	2,608,000
	ANALIS INFORMASI	7	2,608,000

	PENYUSUN BAHAN PUBLIKASI	7	2,608,000
	PENYUSUN BERITA DAN PENDAPAT UMUM	7	2,608,000
	ANALIS PERSANDIAN	7	2,608,000
	PENGOLAH DATA	6	2,266,000
	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
	PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	6	2,266,000
	PENGELOLA DATABASE	6	2,266,000
	PENGELOLA SITUS/ WEB	6	2,266,000
	TENAGA PELIPUTAN	6	2,266,000
	PENGELOLA MEDIA CENTER DAN KEMITRAAN MEDIA	6	2,266,000
	PENGELOLA TV DAN RADIO	6	2,266,000
	PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK	6	2,266,000
	PENGELOLA SISTEM INFORMASI	6	2,266,000
	PENGELOLA KEAMANAN SISTEM INFORMASI	6	2,266,000
	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	6	2,266,000
	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	1,890,000
	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	1,890,000

		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		TEKNISI PRODUKSI MULTIMEDIA DAN WEB	5	1,890,000
		OPERATOR RADIO	5	1,890,000
		OPERATOR TRANSMISI SANDI	5	1,890,000
		OPERATOR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI	5	1,890,000
		TEKNISI JARINGAN INSTALASI	5	1,890,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,203,000
		PENGEMUDI	3	1,203,000
		OPERATOR KOMPUTER GRAFIS	3	1,203,000
		PRAMU KEBERSIHAN	1	1,029,000
22	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	14	9,643,000
		SEKRETARIS	11	5,350,000
		KEPALA BIDANG USAHA MIKRO	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG KOPERASI	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG PERDAGANGAN	11	4,864,000
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	3,680,000
		KEPALA UPT PASAR DAERAH	9	3,680,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,254,000

	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK DAN PEMASARAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI KEWIRAUSAHAAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI FASILITASI DAN PERMODALAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI FASILITASI DAN PEMBIAYAAN KOPERASI	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI METROLOGI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI DISTRIBUSI DAN PROMOSI	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI BINA USAHA PERDAGANGAN	8	3,254,000
	BENDAHARA	7	2,608,000
	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	2,608,000
	PENERA AHLI PERTAMA	7	2,347,000
	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
	PENGOLAH DATA	6	2,266,000
	PRANATA KEARSIPAN	6	2,266,000
	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	1,890,000
	PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	1,890,000

		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENAGIH RETRIBUSI	5	1,890,000
		PENGEMUDI	3	1,203,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,203,000
		PRAMU BAKTI	1	1,029,000
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14	9,643,000
		SEKRETARIS	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN DAN KEDARURATAN	11	4,864,000
		KEPALA BIDANG LOGISTIK REHABILITASI DAN REKONTRUKSI	11	4,864,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	3,680,000
		KEPALA SEKSI KEDARURATAN	9	3,680,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI LOGISTIK	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	8	2,958,000
		BENDAHARA	7	2,608,000
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	2,608,000

		PENYULUH BENCANA	7	2,608,000
		ANALIS MITIGASI BENCANA	7	2,608,000
		ANALIS BENCANA	7	2,608,000
		KOORDINATOR PERGUDANGAN	7	2,608,000
		PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN LOGISTIK	7	2,608,000
		PENGOLAH DATA	6	2,266,000
		PRANATA KEARSIPAN	6	2,266,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
		PRANATA BENCANA	6	2,266,000
		PENGOLAH BAHAN UNTUK RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA	6	2,266,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGEMUDI	3	1,203,000
		PRAMU BAKTI	1	1,029,000
24	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	14	9,643,000
		SEKRETARIS	11	5,350,000

	KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN	11	4,864,000
	KEPALA BIDANG KEARSIPAN	11	4,864,000
	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	3,680,000
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI LAYANAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI DEPOSIT, PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA PERPUSTAKAAN	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN ARSIP STATIS	8	3,254,000
	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PEMASYARAKATAN ARSIP	8	3,254,000
	BENDAHARA	7	2,608,000
	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	2,608,000
	PENGAWAS PERPUSTAKAAN	7	2,608,000
	PENYULUH KEARSIPAN	7	2,608,000
	ARSIPARIS MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN	7	2,347,000
	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
	PENGOLAH DATA	6	2,266,000

		PENGELOLA PERPUSTAKAAN	6	2,266,000
		PENGELOLA PUSTAKA ELEKTRONIK	6	2,266,000
		PRANATA KEARSIPAN	6	2,266,000
		PRANATA REPRODUKSI ARSIP	6	2,266,000
		PUSTAKAWAN TERAMPIL (PELAKSANA)	6	2,040,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	5	1,890,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,203,000
25	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13	8,655,000
		KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	9	3,680,000
		KEPALA SEKSI KESATUAN BANGSA	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI BINA IDEOLOGI DAN POLITIK DALAM NEGERI	8	2,958,000
		BENDAHARA	7	2,608,000
		ANALIS PENDAYAGUNAAN LEMBAGA KEAGAMAAN	7	2,608,000
		ANALIS PERMASALAHAN	7	2,608,000
		ANALIS OPERASI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	7	2,608,000

		ANALIS FORUM KERUKUNAN UMAT	7	2,608,000
		ANALIS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT	7	2,608,000
		ANALIS KEBIJAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	7	2,608,000
		ANALIS ORGANISASI MASYARAKAT	7	2,608,000
		ANALIS DATA INTELIJEN	7	2,608,000
		ANALIS INTELIJEN	7	2,608,000
		ANALIS PARTAI POLITIK	7	2,608,000
		ANALIS PEMILIHAN UMUM	7	2,608,000
		VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN	6	2,266,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
		PENGOLAH DATA	6	2,266,000
		PENGOLAH DATA BERKAS SENGKETA	6	2,266,000
		PENGELOLA DATA KEIMIGRASIAN	6	2,266,000
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
26	KECAMATAN TRENGGALEK	CAMAT TRENGGALEK	12	6,920,000
		SEKRETARIS	11	4,864,000

		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	3,680,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	2,958,000
		BENDAHARA	7	2,608,000
		PENGOLAH DATA	6	2,266,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGEMUDI	3	1,203,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,203,000
27	KECAMATAN POGALAN	CAMAT POGALAN	12	6,920,000
		SEKRETARIS	11	4,864,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	3,680,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	2,958,000

		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	2,958,000
		BENDAHARA	7	2,608,000
		PENGOLAH DATA	6	2,266,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGEMUDI	3	1,203,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,203,000
28	KECAMATAN DURENAN	CAMAT DURENAN	12	6,920,000
		SEKRETARIS	11	4,864,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	3,680,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	2,958,000

		PENGADMINISTRASI PERSURATAN	5	1,890,000
		BENDAHARA	7	2,608,000
		PENGOLAH DATA	6	2,266,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	5	1,890,000
		PENGEMUDI	3	1,203,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,203,000
29	KECAMATAN WATULIMO	CAMAT WATULIMO	12	6,920,000
		SEKRETARIS	11	4,864,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	3,680,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PERIZINAN	8	2,958,000

		BENDAHARA	7	2,608,000
		PENGOLAH DATA	6	2,266,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGEMUDI	3	1,203,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,203,000
30	KECAMATAN MUNJUNGAN	CAMAT MUNJUNGAN	12	6,920,000
		SEKRETARIS	11	4,864,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	3,680,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PERIZINAN	8	2,958,000
		BENDAHARA	7	2,608,000
		PENGOLAH DATA	6	2,266,000

		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	5	1,890,000
		PENGEMUDI	3	1,203,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,203,000
31	KECAMATAN KAMPAK	CAMAT KAMPAK	12	6,920,000
		SEKRETARIS	11	4,864,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	3,680,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	2,958,000
		BENDAHARA	7	2,608,000
		PENGOLAH DATA	6	2,266,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000

		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGEMUDI	3	1,203,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,203,000
32	KECAMATAN GANDUSARI	CAMAT GANDUSARI	12	6,920,000
		SEKRETARIS	11	4,864,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	3,680,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	2,958,000
		BENDAHARA	7	2,608,000
		PENGOLAH DATA	6	2,266,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGEMUDI	3	1,203,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,203,000

33	KECAMATAN KARANGAN	CAMAT KARANGAN	12	6,920,000
		SEKRETARIS	11	4,864,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	3,680,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	2,958,000
		BENDAHARA	7	2,608,000
		PENGOLAH DATA	6	2,266,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGEMUDI	3	1,203,000
PETUGAS KEAMANAN	3	1,203,000		
34	KECAMATAN SURUH	CAMAT SURUH	12	6,920,000
		SEKRETARIS	11	4,864,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	3,680,000

		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	2,958,000
		BENDAHARA	7	2,608,000
		PENGOLAH DATA	6	2,266,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGEMUDI	3	1,203,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,203,000
35	KECAMATAN DONGKO	CAMAT DONGKO	12	6,920,000
		SEKRETARIS	11	4,864,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	3,680,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	2,958,000

		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	2,958,000
		BENDAHARA	7	2,608,000
		PENGOLAH DATA	6	2,266,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGEMUDI	3	1,203,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,203,000
36	KECAMATAN PULE	CAMAT PULE	12	6,920,000
		SEKRETARIS	11	4,864,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	3,680,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	2,958,000
		BENDAHARA	7	2,608,000

		PENGOLAH DATA	6	2,266,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGEMUDI	3	1,203,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,203,000
37	KECAMATAN PANGGUL	CAMAT PANGGUL	12	6,920,000
		SEKRETARIS	11	4,864,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	3,680,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PERIZINAN	8	2,958,000
		BENDAHARA	7	2,608,000
		PENGOLAH DATA	6	2,266,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000

		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGEMUDI	3	1,203,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,203,000
		PRAMU BHAKTI	1	1,029,000
38	KECAMATAN TUGU	CAMAT TUGU	12	6,920,000
		SEKRETARIS	11	4,864,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	3,680,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	2,958,000
		BENDAHARA	7	2,608,000
		PENGOLAH DATA	6	2,266,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000

		PENGEMUDI	3	1,203,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,203,000
39	KECAMATAN BENDUNGAN	CAMAT BENDUNGAN	12	6,920,000
		SEKRETARIS	11	4,864,000
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	3,680,000
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	2,958,000
		BENDAHARA	7	2,608,000
		PENGOLAH DATA	6	2,266,000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2,266,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGEMUDI	3	1,203,000
		PETUGAS KEAMANAN	3	1,203,000
40	KELURAHAN TAMANAN	LURAH TAMANAN	9	4,048,000

		SEKRETARIS	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DAN PELAYANAN UMUM	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT KELURAHAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SARANA PRASARANA KELURAHAN	8	2,958,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
41	KELURAHAN SURODAKAN	LURAH SURODAKAN	9	4,048,000
		SEKRETARIS	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DAN PELAYANAN UMUM	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT KELURAHAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SARANA PRASARANA KELURAHAN	8	2,958,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
42	KELURAHAN NGANTRU	LURAH NGANTRU	9	4,048,000
		SEKRETARIS	8	2,958,000

		KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DAN PELAYANAN UMUM	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT KELURAHAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SARANA PRASARANA KELURAHAN	8	2,958,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
43	KELURAHAN SUMBERGEDONG	LURAH SUMBERGEDONG	9	4,048,000
		SEKRETARIS	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DAN PELAYANAN UMUM	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT KELURAHAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SARANA PRASARANA KELURAHAN	8	2,958,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
44	KELURAHAN KELUTAN	LURAH KELUTAN	9	4,048,000
		SEKRETARIS	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DAN PELAYANAN UMUM	8	2,958,000

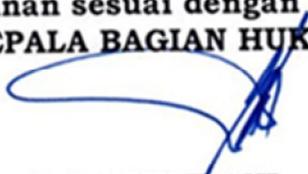
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT KELURAHAN	8	2,958,000
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SARANA PRASARANA KELURAHAN	8	2,958,000
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	1,890,000
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	1,890,000

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004**

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL**

PROSENTASE UNTUK JENIS KETIDAKHADIRAN

A. Tabel Prosentase TL (Terlambat) dan PSW (Pulang Sebelum Waktunya)

NO	KATEGORI	AKUMULASI TL DAN PSW PER HARI	PEMOTONGAN PER HARI
1.	TL 1 dan/atau PSW 1	1 menit sampai dengan 15 menit	0,25 %
2.	TL 2 dan/atau PSW 2	16 menit sampai dengan 30 menit	0,50 %
3.	TL 3 dan/atau PSW 3	31 menit sampai dengan 60 menit	1,00 %
4.	TL 4 dan/atau PSW 4	61 menit sampai dengan 90 menit	1,50 %
5.	TL 5 dan/atau PSW 5	lebih dari 90 menit atau hanya melakukan finger 1 (satu) kali	2,00 %

B. Tabel Prosentase Cuti dan TM (Tidak Masuk)

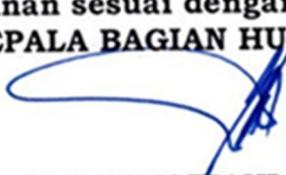
NO	KATEGORI	KETERANGAN/ INTERVAL	PEMOTONGAN PER HARI
1.	CT (Cuti Tahunan)	Menjalani cuti tahunan	2,50 %
2.	CAP (Cuti Alasan Penting)	Menjalani cuti karena alasan penting	1,00 %
3.	CS (Cuti Sakit)	Menjalani Cuti Sakit	1,00 %
4.	CB (Cuti Bersalin)	Menjalani Cuti Bersalin	0,00 %
5.	TM (Tidak Masuk)	Tidak masuk kerja karena alasan yang sah	4 %

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004**

1. Kriteria keterlambatan PNS:

a. Terlambat dan / atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit:

$$KT1 = 0,25 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului};$$

b. Terlambat dan / atau pulang mendahului 16 (enam belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit:

$$KT2 = 0,5 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului};$$

c. Terlambat dan / atau pulang mendahului 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit :

$$KT3 = 1 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului};$$

d. Terlambat dan / atau pulang mendahului 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit :

$$KT4 = 1,5 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas};$$

e. Terlambat dan / atau pulang mendahului lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit / Absen hanya satu kali:

$$KT5 = 2 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas};$$

f. Tidak hadir bekerja dan / atau tidak mengisi daftar hadir kerja;

$$KT6 = 3 \% \times \text{jumlah hari tidak hadir bekerja}.$$

(2) Skor Total Kehadiran dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Skor Total Kehadiran (\%)} = 100\% - \Sigma \text{ketidakhadiran (KT)\%}$$

B. FORMAT PERHITUNGAN PENERIMAAN TPP

DAFTAR SKOR CAPAIAN KINERJA

NAMA PD :

BULAN :

TAHUN :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	CAPAIAN KINERJA	SKOR CAPAIAN KINERJA

Trenggalek ,

Kepala OPD

NIP .

C. FORMAT PERHITUNGAN PENERIMAAN TPP

DAFTAR PERHITUNGAN PENERIMAAN TPP

NAMA PD :

BULAN :

TAHUN :

NO	NAMA/NIP	GOLONGAN RUANG	NO.REKENING	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP 100%	PRODUKTIFITAS KERJA	DISIPLIN KERJA	JUMLAH TPP KOTOR	PPH 21	TPP DITERIMAKAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8=(30%*SCK)	9=(70%*SK)	10=(7*(8+9)/100)	11	12=(10-11)	13

Trenggalek ,

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BENDAHARA PENGELUARAN

BENDAHARA GAJI

(NAMA)
Pangkat
NIP.

(NAMA)
Pangkat
NIP.

(NAMA)
Pangkat
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN